

Dinamika NU: Komitmen Kebangsaan, Semangat Kembali ke Khittah, serta Pemberdayaan Civil Society

Dodo Widarda

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
dodowidarda@uinsgd.ac.id

Budhy Munawar-Rachman

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Indonesia
budhy.munawar@driyarkara.ac.id

Suggested Citation:

Widarda, Dodo; Rachman, Budhy Munawar. (2023). Dinamika NU: Komitmen Kebangsaan, Semangat Kembali ke Khittah, serta Pemberdayaan Civil Society. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 3: 475-488. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.30391>

Article's History:

Received October 2023; Revised October 2023; Accepted October 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

As a force based on civil society in Indonesia, NU represents Ahlus Sunnah wal Jama'ah with concrete movements in the projection of building and developing spiritual awareness and social transformation. This research takes the form of library research using the basis of "Social Religious Research Methodology" to clarify problems related to religion's social reality. To photograph social movements, this article aims to provide a comprehensive overview of the contribution of Nahdlatul Ulama (NU) in empowering Civil Society in Indonesia and is based on many questions: what are the forms of commitment and national spirit. NU's "Return of Khittah" as the entry point for Civil Movement Society in Indonesia? What is the role of Gus Dur – the spirit of social transformation at NU – in empowering civil society? This research shows that NU can dialogue between religion and the realities of state life. In fact, NU is an element of power outside the state and is in the midst of civil society. The spirit of "Back to Khittah" which has resonated since 1984, has found a foothold to seed the civil society movement in Indonesia. In a particular historical period, NU, under the leadership of Abdurrahman Wahid, showed its extraordinary vitality and energy, becoming a civil society force in Indonesia and a "balancer" to the state's hegemonic power. However, when he became president, the social transformation articulated through empowering civil society based on rural communities stagnated because NU's energy was again sucked up by practical political choices to keep Abdurrahman Wahid out of power.

Keywords: social movement; state life; community power; national power; social transformation.

Abstrak:

Sebagai kekuatan yang berbasis masyarakat sipil di Indonesia, NU merupakan representasi Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan gerakan konkrit dalam proyeksi membangun dan mengembangkan kesadaran spiritual dan sekaligus transformasi sosial. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan landasan "Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan" untuk memperoleh kejelasan permasalahan yang berkaitan dengan realitas sosial agama. Dalam rangka memotret gerakan sosial, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemberdayaan Masyarakat Sipil di Indonesia dan didasari oleh sejumlah pertanyaan, apa bentuk komitmen dan semangat kebangsaan. "Kembalinya Khittah" NU sebagai pintu masuk Civil Movement Society di Indonesia? Apa peran

Gus Dur – semangat transformasi sosial di NU – dalam pemberdayaan masyarakat sipil? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NU mempunyai kemampuan mendialogkan antara agama dan realitas kehidupan bernegara. Padahal, NU merupakan elemen kekuasaan di luar negara dan berada di tengah-tengah masyarakat sipil, dan semangat “Kembali ke Khittah” yang bergaung sejak tahun 1984, telah menemukan pijakan untuk menyemaikan gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Dalam kurun waktu sejarah tertentu, NU di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid mampu menunjukkan vitalitas dan energinya yang besar, menjadi kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan menjadi “penyeimbang” kekuatan hegemonik negara. Namun, ketika ia menjadi presiden, transformasi sosial yang diartikulasikan melalui pemberdayaan masyarakat sipil berbasis komunitas pedesaan mengalami stagnasi karena energi NU kembali tersedot oleh pilihan politik praktis untuk menjauhkan Abdurrahman Wahid dari kekuasaan.

Kata Kunci: gerakan sosial; kehidupan bernegara; kekuatan masyarakat; kekuasaan nasional; transformasi sosial.

PENDAHULUAN

NU memiliki kiprah yang sangat luas di dalam kehidupan sosial masyarakat (Madid, 2018). Berbagai usaha terkait dengan pendidikan serta reformasi sosial ekonomi, merupakan kerja-kerja praktis yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat banyak (NU, 2015). Di luar kerja-kerja politik praktis, jalan NU untuk melakukan pemberdayaan melalui bargaining dengan beragam elemen masyarakat lebih terbuka untuk dilakukan (Haidar et al., 1998). Menurut A.S. Hikam (Hikam, 2000), kekuatan politik NU yang riil adalah sebagai penyeimbang kekuatan negara, bersama-sama dengan kelompok-kelompok strategis yang lain. Jika NU hanya terkonsentrasi pada politik praktis, maka kekuatannya menjadi tereduksi dan mudah terombang-ambing oleh pluktuasi politik.

Dalam catatan Esty Ekawati (Ekawati, 2016), sesuai dengan hasil Muktamar XXVII di Situbondo, NU melepaskan peran sebagai partai politik dan kembali ke khittah 1926 dengan penegasan menjalankan peran sosial, keagamaan dan pendidikan. Dalam wacana kembali ke khittah tersebut, maka visi politik NU tentang Indonesia adalah “politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat.”

Cikal bakal dari lahirnya NU adalah dari pembetukan Komite Hijaz. Pembentukan acara Hijaz di desa Kertopaten Surabaya pada tanggal 31 Januari dan hadir di Majelis termasuk Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Bishri Syansuri, K. Raden Asnawi, KH Ma'shum, KH Nawawi, KH Ridwan, KH Faqih dan KH Abdul Halim (Fuad, 2020). Dukungan terhadap NU dengan cepat meluas, karena pengaruh Hadratus-Syekh yang besar di kalangan para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah (Dhofier, 1982). Ketika merancang Komite Hijaz, tujuan nomer satunya adalah untuk menuntut kemerdekaan, “agar umat Islam leluasa menjalankan syari'at agama mereka” disamping dari tantangan intern umat Islam sendiri yang terusik ketenangannya karena munculnya aliran baru (Haidar et al., 1998). Oleh karena itu, lahirnya NU merupakan puncak dari upaya kecil para ulama tradisional Islam Sunni untuk mengkoordinasikan upaya dan melaksanakan tugas keagamaannya (Kadir, 1999).

NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, serta menurut A.S. Hikam NU sebagaimana organisasi sosial ataupun politik yang mencoba mengembangkan independensinya mempunyai potensi memperkuat civil society di Indonesia, selayaknya berbagai kelompok pro demokrasi lainnya (Ekawati, 2016). Organisasi sosial kemasyarakatan Islam ini, telah teruji dari sisi sejarah sebagai elemen penting civil society, untuk melakukan berbagai aspek pemberdayaan dengan modal potensi besar sebuah kekuatan masyarakat civil serta melakukan bargaining ketika berhadapan dengan negara. Dengan kata lain, bahwa apa yang dilakukan NU ini adalah melakukan sebuah transformasi sosial sebagai elemen kekuatan di luar negara. Terkait transformasi sosial ini, sangat menonjol ketika NU berada dalam kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Wahid, 1999). Seperti menurut Bahtiar Effendy, tokoh pembaharuan teologis/keagamaan yang satu ini, yang sejak terpilih menjadi Ketua Umum PBNU terlibat di dalam program transformasi sosial, tampil sebagai pengkritik paling keras terhadap watak serba

mengontrol (hegemonik) pemerintahan Orde Baru dan kebijakan sosial politiknya yang tidak memberi ruang terhadap lawan-lawan politiknya (Effendy, 1998).

Dengan latar belakang di atas, penulis bermaksud memfokuskan penelitian ini pada posisi NU sebagai pilar dari gerakan civil society di Indonesia. NU memiliki andil sangat mendasar dalam proses dialektika kehidupan berbangsa dan juga proses pendewasaan kehidupan bermasyarakat. Perlu bidikan yang cermat untuk menemukan potret dan peranan NU secara obyektif sebagai salah satu pilar gerakan civil society di Indonesia.

Kajian terkait NU dan pemberdayaan civil society telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebuah disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1993) oleh M. Ali Haidar serta dibukukan dengan judul "Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik" menjadi referensi yang sangat penting, baik untuk memahami gerakan NU secara lebih umum maupun kiprahnya dalam mengembangkan politik kebangsaan menuju Indonesia yang lebih demokratis. Memang tidak ada bagian yang membahas tentang pemberdayaan civil society. Tapi lewat pembahasannya yang luas serta mendalam sampai pada semangat "Kembali ke Khittah 1926", kita bisa membaca dinamika konteks historis terkait gerakan penguatan transformasi sosial emansipatoris di mana kerja-kerja civil society itu dilakukan. Langkah untuk mengejawantahkan semangat "Khittah 1926" dengan menciptakan mekanisme kepemimpinan yang dapat mengendalikan semua garapan NU dan pembagian kerja aparatnya dalam suatu strategi yang jelas. Langkah NU ini bertekad untuk menghidupkan kembali peran perangkat kelembagaan yang ada dan sektor kegiatan yang menjadi lahan khidmah NU seperti ulama dan syuriah, kebudayaan, kepemudaan, buruh, tani dan nelayan, dan bidang pembentukan kepribadian (Haidar et al., 1998).

Kajian yang lebih baru dari Esty Ekawati dengan judul "Nahdatul Ulama (NU) Sebagai Civil Society di Indonesia" (2016) yang menempatkan NU sebagai sebuah organisasi keagamaan di Indonesia yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Selain itu, kegiatan-kegiatan NU di bidang pendidikan, perkembangan demokrasi, dan aktivitas sosial lainnya membuat NU tetap eksis dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Sementara itu, dua pilar besar pemberdayaan civil society Indonesia, NU dan Muhammadiyah ditulis oleh Andi Jupri (Jufri, 2022) dengan judul "Islam And Strengthening Civil Society (The Portrait Of The Experiences Of Nahdlatul Ulama (Nu) And Muhammadiyah)" "Islam Dan Penguatan Masyarakat Sipil (Potret Pengalaman Nahdlatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah)". Dalam mewujudkan gerakan intelektual dan pemberdayaan masyarakat, NU dan Muhammadiyah telah berhasil mengkondisikan terciptanya ruang publik yang bebas, iklim kehidupan politik yang demokratis, kehidupan sosial politik yang toleran, menerima pluralitas sebagai kenyataan dan mendorong penguatan wawasan tentang pluralisme dan multikulturalisme, serta terus memperjuangkan keadilan sosial.

Sementara disertasi dari luar negeri, telah ditulis Suzaina Abdul Kadir pada program Doktor Filsafat Universitas Winconsin Madison Amerika Serikat (1999) yang berjudul "Traditional Islamic Society in The State in Indonesia: The Nahdlatul Ulama, Political Accommodation in the Preservation of Autonomy (1984-1997)" ("Masyarakat Islam Tradisional dalam Negara di Indonesia: Nahdlatul Ulama, Akomodasi Akomodasi Dalam Pelestarian Otonomi (1984-1997)". Pada salah satu bagian dari disertasi ini, Suzaina Abdul Kadir menulis tentang institusi-institusi NU yang baru yang dibuat secara khusus untuk misi baru organisasi untuk melakukan transformasi sosial-ekonomi, termasuk Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) yang didirikan tahun 1985. Misi institusi tersebut sebagai berikut: "the creation of NU community into an autonomous social force that can become a model for civil society in Indonesia...with the hope that this social force will aid in the democratization process" ("terbentuknya komunitas NU menjadi kekuatan sosial otonom yang dapat menjadi model civil society di Indonesia...dengan harapan kekuatan sosial ini dapat membantu proses demokratisasi."

Peneliti dari Amerika yang lain, Robin Bush juga telah menulis sebuah disertasi di Universitas Washington Amerika Serikat (2002) dengan judul: "Islam and Civil Society in Indonesia: the case of Nahdlatul Ulama" ("Islam dan Civil Society di Indonesia: Kasus Nahdlatul Ulama"). Disertasi ini menguji kekuatan dari diskursus civil society di dalam konteks historis dari gerakan "Kembali ke Khittah 1926" dan mengeksplorasi respon aktivis-aktivis pro-civil society NU untuk pengembangan politik di bawah kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid—di dalam analisis partikular peranan dari konflik modernis-tradisionalis dalam membentuk bukan hanya pemahaman tentang civil society, tetapi juga gerakan-gerakan penting dalam Islam secara lebih umum.

Karena berbagai keterbatasan, maka penelitian ini merupakan library research (studi pustaka) serta pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menelaah, mengeksplorasi berbagai sumber bacaan, baik yang berbahasa Indonesia maupun Inggris. Dalam tulisan ini, penulis mempergunakan basis "Metodologi Penelitian Sosial-Agama" untuk mendapatkan kejernihan masalah terkait realitas sosial keberagamaan. Dalam pandangan Imam Suprayogo serta Tobroni, gejala-gejala sosial-agama seperti budaya manusia dalam bertuhan, kohesi kelompok dalam organisasi keagamaan, perilaku ritus dan sebagainya, sungguh merupakan gejala yang abstrak dan verbalisme. Gejala-gejala sosial-agama itu dapat berupa tindakan-tindakan, ucapan-ucapan/ungkapan-ungkapan, sikap-sikap, simbol-simbol yang dihargai, cita-cita, emosi-emosi dan pikiran-pikiran yang oleh pelakunya dianggap memiliki keterkaitan dengan hidup keberagamaannya atau merupakan perwujudan dari ajaran atau doktrin agama yang diyakini (Tobroni, 2003).

METODE

Penelitian ini berbentuk library research dengan mempergunakan basis "Metodologi Penelitian Sosial-Agama" untuk mendapatkan kejernihan masalah terkait realitas sosial keberagamaan (Herdiansyah, 2010). Dalam kerangka memotret gerakan sosial, tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran komprehensif bagaimana kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) di dalam pemberdayaan Civil Society di Indonesia serta didasarkan pada sejumlah pertanyaan, bagaimanakah wujud komitmen kebangsaan serta semangat "Kembali ke Khittah" NU sebagai titik masuk gerakan Civil Society di Indonesia? Bagaimana pula peranan Gus Dur—pembawa semangat transformasi sosial di NU—di dalam pemberdayaan civil society? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NU memiliki kemampuan mendialogkan agama dengan realitas kehidupan bernegara (Tobroni, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen Kebangsaan NU

Jiwa nasionalis NU sudah mulai muncul sejak awal kelahirannya pada tanggal 31 Januari 1926 karena didorong oleh semangat untuk mencapai kemerdekaan. Di dalam negara yang merdeka, umat Islam dapat menjalankan syariat agamanya secara lebih leluasa. Di dalam suasana kebatinan masih berada dalam cengkraman kolonialisme Belanda, NU terus melakukan ikhtiar memajukan kehidupan umat lewat langkah-langkah seperti dituliskan oleh Jamakhsyari Dhofier dengan merujuk pada Anggaran Dasar NU tahun 1927, organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum muslimin kepada salah satu dari mazhab empat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan para anggotanya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: 1. Memperkuat persatuan sesama ulama yang masih setia kepada ajaran-ajaran mazhab; 2. Memberikan bimbingan tentang jenis-jenis buku/kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam; 3. Penyebaran ajaran-ajaran Islam yang sesuai tuntutan mazhab empat; 5. Memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya; 5. Membantu pembangunan masjid-masjid, langgar dan pondok pesantren; dan 6. Membantu/mengurusikan anak-anak yatim piatu dan fakir miskin (Dhofier, 1982).

Sejak pembentukannya, NU menjadi penghadang bagi penyebaran pikiran-pikiran Islam modern ke desa-desa di Jawa, dan sejak akhir tahun 20-an tercapai suatu status-quo di mana kaum modern memuatkan misinya di lingkungan perkotaan, sedangkan Nahdlatul Ulama cukup puas menarik pengikutnya terutama mereka yang berasal dari daerah pedesaan (Dhofier, 1982). Di daerah pedesaan itu basis kehidupan pesantren berada sehingga tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa kegiatan ulama pesantren membentuk organisasi sosial keagamaan jauh sebelum NU lahir, merupakan embrio bagi kelahiran NU. Suatu tahap perkembangan obsesi mereka untuk mewujudkan negeri merdeka, obsesi untuk menempatkan syari'ah sebagai bagian dari kehidupan kebangsaan mereka (Rubaidi, 2008).

Empat motif utama para ulama mendirikan NU seperti menurut M. Ali Haidar. Motif utama serta pertama ialah motif keagamaan sebagai jihad fi sabilillah. Kedua, ialah tanggung jawab pengembangan pemikiran keagamaan yang ditandai upaya pelestarian ajaran mazhab ahlussunnah waljamaah. Ini tidak berarti statis, tidak berkembang, sebab pengembangan yang dilakukan justru bertumpu pada akar kesejarahan sehingga pemikiran yang dikembangkan itu memiliki konteks historis. Ketiga, ialah dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ini ditandai dengan pembentukan Nahdatul Watan, Taswirul Afkar, Nahdatul Tujjar, dan Ta'mirul Masajid. Keempat, ialah motif

politik yang ditandai semangat nasionalisme ketika pendiri NU itu mendirikan cabang Serikat Islam (SI) di Makkah serta obesesi mengenai hari depan negeri merdeka bagi umat Islam (Haidar et al., 1998).

Nahdlatul Ulama' (NU) pimpinan KH. Hasyim Asy'ari sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme yang berdasarkan atas shari'at Islam alā Ahlu al-Sunnah wal al-Jamā'ah (Farih, 2019). Integrasi antara pemahaman keagamaan pada satu sisi, dengan nilai-nilai kebangsaan serta nasionalisme pada sisi, termanifestasikan pada berbagai realitas sejarah yang menunjukkan pergulatan NU secara intens dalam kerja-kerja dialogis keumatan berkesinambungan. NU, dengan demikian telah menyumbangkan pemikiran konstruktif untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan wawasan kebangsaan yang akhirnya tumbuh pada abad ke-20. Pidato-pidato K.H. Hasyim Asy'ari di beberapa daerah sekitar Jombang dan Surabaya ketika meresmikan berdirinya cabang NU, maupun dalam kesempatan pengajian selalu menekankan arti penting persatuan umat Islam di Indonesia serta telah memberikan cara pandang yang segar bagi sebuah negeri yang saat itu, masih berada dalam cengkraman kekuasaan penjajah. Hanya lewat persatuan, jalan untuk kemerdekaan bisa dicapai serta bangsa yang baru akan segera lahir. Sikap konsisten NU untuk mendialogkan secara kreatif antara pandangan keagamaan dengan kesadaran nasionalisme bisa terbaca lewat rentang sejarah sangat panjang, dari upaya merebut kemerdekaan, mempertahankan, serta mengisinya sekaligus.

Keputusan Mukhtamar Banjarmasin.

Peranan NU pada ranah kesejarahan, dapat dilihat pada keputusan Mukhtamar NU ke-2 di Banjarmasin pada tahun 1936. Mukhtamar memutuskan bahwa kedudukan Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Dār al-Islām, yang menegaskan keterikatan NU dengan nusa-bangsa (Farih, 2019). Mukhtamar NU di Banjarmasin ini telah membuat keputusan dalam kaitan dengan pembelaan negeri dari ancaman musuh bahwa Indonesia adalah negeri muslim (dār al-Islām). Faktanya, Indonesia saat itu masih dikuasai oleh Belanda, namun tidak menghalangi NU membuat keputusan itu, karena kenyataan mayoritas penduduknya beragama Islam dan umat Islam bebas menjalankan syariat agama. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan adalah wajib membela negeri yang mayoritas penduduknya muslim dari ancaman musuh. Menariknya, seperti dalam tulisan Amin Farih (Farih, 2019), Dār al-Islām ini tidak dimaknai sebagai "negara Islam", melainkan "wilayah Islam", sebab di dalamnya umat Islam bebas melaksanakan syari'at Islam. Dengan cara ini, NU telah membentuk "kebangsaan Islam" (Islamic nationalism) sebab Dār al-Islām tersebut dipahami sebagai bangsa. Artinya, ketika Nusantara diakui sebagai Dār al-Islām, wilayah ini telah dipahami sebagai bangsa muslim Indonesia (Fitriani & Aisyah, 2019).

Walaupun syariat Islam tidak berlaku secara formal di Indonesia waktu itu, tetapi negeri ini dahulunya merupakan negeri Islam yang diperintah raja-raja Islam dan kaum muslimin bebas menjalankan agama. Hal ini terkait dengan rasionalisasi dari keputusan strategis NU untuk membela tanah air dan bangsa dari kemungkinan timbulnya anarki lebih besar secara politik, tanpa mengaitkan dengan sistem kekuasaan yang berlaku saat itu. Namun, walaupun memberi stempel Dār al-Islām bagi status sebuah negeri yang saat itu masih terjajah, NU tetaplah berada pada sikap anti kolonialisme. Hal ini yang mendasari KH. M. Dachlan menulis artikel pada tahun 1954, serta mengatakan, "perjuangan anti penjajah merupakan asal-usul berdirinya NU" (Ulum, 2002).

Seperti dalam tulisan Bahrul Ulum, NU mencatat berbagai sukses yang tidak dapat dilupakan Bangsa Indonesia, seperti; (a) memperjuangkan pencabutan "Guru Ordonnantie" yang dialamatkan kepada sekolah-sekolah dan pesantren di mana penguasa kolonial mengancam kehidupan sekolah yang pengelolaannya kurang teratur; (b) menolak kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk mencabut artikel 177 Indische Startregeling yang mengandung semangat dan politik diskriminasi golongan dan agama; (3) melarang pemuda-pemudi Islam memasuki milisi Belanda untuk menghadapi tentara Jepang; (d) mengharamkan pemberian sumbangan darah bagi kepentingan militer kolonial Belanda; (e) menolak subsidi yang diberikan pemerintah kolonial Belanda kepada madrasah-madrasah NU, dan; (f) memperotes masalah penarikan warisan dari wewenang Pengadilan Agama. Sangat jelas, bahwa pebelan Dār al-Islām dalam kerangka pemberian proteksi bagi umat untuk melaksanakan syariat agama sembari pada saat bersamaan tetap kritis serta menolak terhadap berbagai kebijakan pemerintahan kolonial.

Perumus Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945

Menjelang kemerdekaan NU melalui wakil-wakilnya turut serta merumuskan Pancasila dan UUD 1945 (Haidar et al., 1998). Ketika Proklamasi 17 Agustus 1945 diumumkan, NU turut pula memainkan peranan memecahkan problem yang paling krusial di dalam sejarah bangsa. Akhirnya, Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 disepakati. NU menerima konsep negara-bangsa, bukan negara Islam pada pembentukan konstitusi 1945. Wakil dari NU di sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yakni KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, dan KH. Zainul Arifin, telah menyepakati bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kerangka perawatan kemajemukan bangsa. Dalam kacamata kelompok besar Islam di Indonesia, NU, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah harga mati. Dua perangkat landasan terbentuknya NKRI itu dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam yang dirumuskan para pendiri bangsa dengan mempertimbangkan akidah, hukum, dan akhlak Islam. Keterlibatan sejumlah tokoh NU pada posisi strategis, adalah integrasi para ulama terhadap upaya mencapai kemerdekaan serta mengantarkan Bangsa Indonesia terhadap peristiwa Proklamasi pada 17 Agustus 1945.

1. Resolusi Jihad

Pergulatan perjuangan kemerdekaan lalu disusul dengan "Resolusi Jihad" yang mewajibkan umat Islam membela negara yang baru diproklamasikan sebagai jihad fi sabilillah. Menurut M. Ali Haidar, sikap NU ini merupakan tahapan lanjutan dari sikap sebelumnya. Sebelumnya, NU mengaku tumpah darah dan tanah air Indonesia sebagai wilayah yang harus dilindungi karena wilayah itu adalah wilayah negeri Islam, maka ketika kemerdekaan Indonesia diakui sebagai negara berdaulat yang sah, harus dibela dari ancaman penjajahan Belanda. Bagi golongan Islam, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari perjuangan mereka untuk menegakkan agama. Dengan latar belakang tersebut NU pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan Resolusi Jihad, berperang membela tanah air Indonesia melawan penjajah Belanda adalah wajib. 22 Oktober ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri.

Pada bulan September 1945, pasukan Inggris dengan membonceng Belanda mendarat di Jawa, dengan misi akan mancapkan kembali kekuasaannya di Hindia Belanda. Jakarta, Bandung, Semarang telah jatuh ke tangan mereka. Selanjutnya mereka mempersiapkan pendaratannya di Surabaya. Menghadapi ancaman itu para ulama berkumpul pada tanggal 22 Oktober dan menyatakan perang jihad (jihad fi sabilillah) terhadap sekutu Inggris Belanda. Para ulama memohon serta mendesak pemerintah Republik Indonesia agar bersikap serta bertindak secara tegas terhadap usaha-usaha yang mengancam kemerdekaan, agama dan negara Indonesia, khususnya terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Seperti menurut Suzaina Abdul Kadir, Resolusi Jihad, sangat penting adalah menggalang dukungan massa untuk melakukan perang fisik habis-habisan melawan Belanda. Hizbullah dan Sabilillah, satuan militer lain yang dibentuk dan dipimpin oleh para kyai dari Jawa Timur, bertempur dengan gagah berani melawan kembalinya Pasukan Belanda dan Inggris (Kadir, 1999). Resolusi Jihad ini yang telah mengobarkan semangat Perang 10 November 1945 di Surabaya. Apa yang kita kenal kemudian sebagai Palagan Surabaya.

2. Peletak Dasar Konsep "*Waliyul Amr al-Darûri bi al-Syaukah*"

Kekuasaan pemerintah mendapatkan pengakuan dari NU melalui keputusan konferensi alim ulama yang menyatakan bahwa presiden dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan penyelenggara kenegaraan dengan sebutan waliyyul amr al-darûri bi al syaukâh. Konsep ini merujuk pada konferensi alim ulama yang diadakan 12-13 Mei 1952, 4-5 Mei 1953 serta 3-7 Maret 1954 yang telah memberikan dasar legitimasi terhadap sistem pemerintahan sebuah negara dengan seorang pemimpin beragama Islam, tetapi belum memenuhi syarat sebagai negara menurut hukum Islam. Diakui bahwa Sultan menurut hukum Islam adalah pemegang kekuasaan yang berwenang melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan bernegara, tapi kekuasaan negara RI belumlah dianggap memenuhi konsep imamah di atas. Walaupun demikian, secara defakto memiliki kekuatan serta diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, umat Islam juga merupakan mayoritas penduduk, tetapi tidak mungkin membangun kekuasaan politik sendiri untuk menjalankan hukum Islam, maka kekuasaan yang memiliki *syaukah* (kekuatan) diterima dalam keadaan darurat atau temporer (Haidar et al., 1998).

Keputusan konferensi alim ulama berkaitan dengan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1952 tentang Wali Hakim. Keputusan konferensi alim ulama dengan Menteri Agama selengkapnya adalah:

- a. Presiden sebagai Kepala Negara, serta alat-alat negara sebagaimana dimaksud dalam UUD pasal 44, yakni Kabinet, Parlemen dan sebagainya adalah *Waliyyu'l Amri Dlaruri bi'Syaukah (waliyy al-amr al-dlaruri al-syaukah)*.
- b. *Waliyyu'l Amri Dlaruri* wajib ditaati oleh rakyat dalam hal-hal yang tidak menyalahi syari'at Islam.
- c. Tauliyah Wali Hakim dari Presiden kepada Menteri Agama dan seterusnya kepada siapa saja yang ditunjuk oleh Ahlu'l-halli Wa'l-aqdi, adalah sah. Untuk menjalankan aqad-akad nikah Wali Hakim, sesuai dengan yang dimaksud oleh UU Pencatatan Perkawinan, Talaq, dan Ruju' harus ada surat peresmian lebih dahulu dari pemerintah.
- d. Berhubung dengan ayat 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka nyatalah bahwa Peraturan Menteri Agama Nomer 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa dan Madura adalah sah.
- e. Penerimaan Pancasila sebagai Asas Tunggal Bernegara

Pada masa upaya merebut kemerdekaan, sejumlah tokoh NU memiliki andil yang besar untuk merumuskan dasar negara Pancasila serta UUD 1945. Peran tersebut adalah bagian dari upaya memperjuangkan hal-hal lebih substantif daripada aspek-aspek simbolik sehingga NU bisa berdiri tegak untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, dalam pandangan Amin Farih, memperjuangkan tagaknya nilai-nilai substantif ajaran Islam dalam sebuah negara—apapun nama negara itu, Islam atau bukan—jauh lebih lebih penting dari pada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam (Farih, 2019).

Konsistensi NU, sebagaimana ketika ikut merumuskan dasar negara Pancasila pada tahun 1945, telah menempatkan dasar negara tersebut sebagai pilihan ideologi yang final. Bagi organisasi NU sebetulnya diskusi tentang relasi agama vis-a-vis negara, atau Islam vis-a-vis Pancasila, sudah dapat dianggap selesai. Keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984 telah mengakhiri perdebatan ini. Muktamar yang berlangsung tanggal 8-12 Desember 1984 itu mengukuhkan keputusan Musyawarah Alim Ulama Nasional NU 1983 yang memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dan memulihkan kembali NU menjadi organisasi keagamaan sesuai dengan Khittah (semangat) 1926. Achmad Siddiq, seseorang yang menyampaikan pikiran penting terkait Pancasila sebagai azas tunggal bernegara, telah menolak mengaitkan asas Islam sebagai Ideologi. Islam adalah agama wahyu, sementara ideologi politik hasil pikiran manusia. Agama, menurut Achmad Siddiq, bagi suatu organisasi keagamaan, seperti halnya bagi pemeluknya, merupakan sesuatu yang prinsipil. Lebih dari sekedar ideologi. Oleh karenanya, NU dapat dibenarkan memenuhi ajakan pemerintah tentang asas tunggal Pancasila, dan itu tidak berarti mengesampingkan Islam. Dengan penerimaan NU terhadap Pancasila, organisasi Islam terbesar, sebenarnya telah melegitimasi inisiatif pemerintah agar Pancasila menjadi satu-satunya prinsip ideologi untuk semua kelompok organisasi massa (Kadir, 1999).

Antara Gerakan Kembali ke Khittah dan Pemberdayaan Civil Society; Gerakan Kembali ke Khittah 1926

Pada awal tahun 1980-an 24 individu dari aktivis-aktivis generasi muda telah berkumpul di Jakarta untuk konseptualisasi ide NU kembali pada peranan utama sebagai organisasi sosial keagamaan. Mereka memilih tujuh orang di antara mereka sendiri untuk mulai mempromosikan argumentasi-argumentasi mereka kepada sejumlah kiai berpengaruh di NU. Tujuh orang itu adalah Abdurrahman Wahid sebagai pimpinan, M. Zamroni (asisten), HM. Said Budairi (sekretaris), H. Machbub Junaidi, Dr. Fahmi Saefuddin, HM. Daniel Tanjung, serta Ahmad Bagdja. Para aktivis itu juga mulai mempublikasikan ide-ide mereka di dalam sebuah jurnal, "Khittah". Majelis 24, sebagaimana mereka datang untuk diketahui, telah mengajukan argumen bahwa sangat fundamental bagi NU untuk kembali pada peranan yang asli dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial-ekonomi serta religius dari jamaah (Kadir, 1999). Rumusan yang telah dihasilkan tim tujuh inilah yang kemudian dijadikan bahan Munas 'alim 'ulama tahun 1983 dan Muktamar NU ke-27 di Situbondo 1984. Keputusan yang paling menarik dan monumental adalah penerimaan asas tunggal Pancasila dan keputusan kembali ke khittah 1926. Mereka, tim tujuh mencela aksi-aksi sejumlah pemimpin di Jakarta dan menuduh mereka hanya melayani kepentingan politik mereka sendiri.

Kekecewaan yang dialami NU akibat konflik dengan unsur lain dalam PPP berkembang menjadi salah satu faktor pendorong yang mempercepat langkah NU menuju Khittah 1926. Konflik antar unsur dalam PPP menjelang pemilihan umum 1982, seperti ditulis Haidar, diuraikan lebih rinci oleh Mahrus Irsyam sampai akhirnya 29 orang tokoh NU tergusur dari nominasi calon terpilih mewakili PPP, dan tampaknya, yang muncul kemudian adalah koreksi total atas posisi NU di PPP, sesuatu yang sebenarnya sudah dipikirkan secara

mendalam oleh kalangan intern NU sendiri. Dorongan "Kembali Kepada Khittah 1926" tidak semata pengambilan jarak dengan PPP, tetapi lebih didasarkan pada kesadaran atas nilai-nilai asli dari NU sendiri sejak kelahirannya pada tahun 1926 seperti menurut Bahrul Ulum, pada dasarnya adalah organisasi yang bergerak di bidang agama, sosial, dakwah, dan pendidikan. Dengan kembalinya NU menjadi organisasi keagamaan, ulama dapat memfokuskan tenaga dan pikirannya untuk pengembangan dan pemberdayaan umat melalui program yang dipersiapkan secara matang dan meliputi bidang sangat luas. NU telah benar-benar beralih orientasi dari "politik praktis" ke "sosial praktis", dari "prestise politis" ke "prestise keagamaan" dalam masyarakat (Ulum, 2002).

NU dan Pemberdayaan Civil Society

Terkait masalah NU dan pemberdayaan civil society, NU sebagai ormas terbesar di Indonesia, sejak berdiri tahun 1926, sudah memiliki potensi dalam proses perkembangan civil society di Indonesia. Meskipun dalam kurun 1926-1984 belum menunjukkan "wajahnya" (performance) yang jelas (Ulum, 2002). Manifestasi dari gerakan civil society baru menemukan momentum yang tepat, saat NU melakukan reorientasi dinamika gerakannya setelah ormas tersebut kembali pada semangat khittah 1926. Menarik diri dari arena politik praktis dengan basis supra struktur partai politik menuju pada sebuah pola gerakan kultural dengan jangkar pemberdayaan masyarakat sebagai model utamanya. A.S. Hikam, salah seorang pioner gerakan civil society di Indonesia berpendapat bahwa kekuatan politik NU yang rill sebagai penyeimbang kekuatan negara, bersama-sama dengan kelompok strategis yang lain. Jika NU hanya terkonsentrasi pada politik praktis, maka kekuatannya menjadi tereduksi dan mudah terombang-ambing oleh fluktuasi politik (Hikam, 2000).

Penerimaan NU terhadap gagasan emansipatoris civil society adalah bagian dari kemampuan ormas itu untuk mendialogkan wawasan keislaman dengan perkembangan pemikiran Barat dalam rentang waktu yang sangat panjang serta mengkristal pada perkembangan Abad Pencerahan. Hal ini merupakan lompatan sangat penting karena dengan kemampuan dialogis itu, NU yang dicap sebagai organisasi tradisional, mampu membuka dirinya dengan cara yang elegan untuk menerima gagasan dari sumber pemikiran Barat dalam menopang proses demokratisasi masyarakat. Apa yang terjadi di NU, menjadi antitesis dari sejumlah prasangka yang berkembang di Barat ketika masyarakat Islam dipandang anti demokrasi seperti dalam catatan Robin Bush dengan mengingat kenyataan empiris yang ada bahwa demokrasi, dalam arti yang seluas-luasnya, telah menjadi sistem politik yang paling menonjol di seluruh dunia, dan, menurut Esposito dan Voll, menjadi "wacana politik yang dominan". Dalam kasus Islam, hal ini membangkitkan perdebatan panjang dan sering kali memanas tentang apakah Islam "cocok" dengan demokrasi. Para pemikir baik dari tradisi non-Muslim maupun Muslim telah berargumentasi, kadang-kadang dengan keras, bahwa Islam pada dasarnya tidak sesuai dengan demokrasi. Pandangan orientalis klasik adalah tentang Timur yang "lalim" dan "tidak rasional" di mana kelemahan masyarakat menghalangi batasan-batasan pada negara yang serba kuat. Seperti yang dicatat Turner, "pandangan orientalis tentang masyarakat Asia dapat dirangkum dalam gagasan bahwa struktur sosial dunia Timur dicirikan oleh tidak adanya civil society (Bush, 2002).

Secara geneologis, istilah awal civil society dikemukakan oleh Cicero (106-43 SM) yang menerjemahkan term ini dari term latin, *civilis societies*, yang pengertiannya mengacu pada fenomena budaya perorangan, dan masyarakat civil society disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*), yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup (Ulum, 2002). Pada pemikir modern telah memberi penajaman artikulasi dari konsep civil society ini mulai dari Thomas Hobbes (1588-1679), tokoh empirisme John Locke (1632-1704), J.J. Rousseau (1712-1778), Adam Ferguson (1723-1816), Thomas Paine (1737-1809), filsuf besar Jerman Hegel (1770-1831), Karl Marx (1818-1883), Antonio Gramsci (1891-1933), Alexis de Tocqueville (1805-1859) sampai Earnest Gellner (1925-1995). Ada artikulasi beragam model tentang pemikiran civil society ini. Tetapi seperti dalam catatan Bahrul Ulum, ada satu kesamaan garis besar bagaimana istilah itu dipahami, yakni terdapat suatu istilah umum "civilitas (civility)" yang merupakan inti dari konsep tersebut.

Pijakan filosofis dari pemikir abad pencerahan di atas, sebagaimana ditulis oleh A.S. Hikam, membuat para cendekiawan dalam gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur mencoba mengupayakan terciptanya sebuah masyarakat terbuka (*open society*) sebagai antithesis masyarakat tertutup (*closed society*) yang dilahirkan rejim totaliter. Masyarakat Eropa Timur memiliki permasalahan hampir sama dengan Indonesia, yakni

lemahnya civil society dan menyempitnya wilayah publik. Civil Society, sebagaimana dikonsepsikan para pemikirnya, memiliki tiga ciri utama, yaitu; (1) adanya kemandirian cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat utamanya ketika berhadapan dengan negara; (2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik; (3) adanya kemampuan membatasi negara agar ia tidak intervensionis (Ulum, 2002).

Dengan berpijak pada semangat kembali ke Khittah 1926 serta mendorong kemandirian jamaah, NU berada pada garis perjuangan aslinya serta hadir di tengah-tengah kehidupan umat demi sebuah gerakan transformasi sosial. Menurut Abdul Kadir, hal itu memang sengaja untuk transformasi NU ke dalam gerakan sosial yang diarahkan menuju pada pemberdayaan dan pengembangan civil society dalam jangka panjang. Menurut Hendro Prasetyo, setidaknya ada dua hal penting yang bisa menjadi dasar terbentuknya modal sosial NU untuk menjadi bagian dari civil society, yaitu; (1) kembalinya NU ke Khittah 1926 pada Mukhtamar Situbondo tahun 1984, dimana komitmen awal didirikannya NU adalah sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak pada bidang – bidang sosial, agama, pendidikan dan berorientasi pada kesejahteraan ummat; (2) munculnya generasi-generasi muda terpelajar NU yang disebut sebagai generasi kedua yang tidak hanya terkonsentrasi di pesantren-perantren (seperti generasi pertama) tetapi juga sudah terintegrasi dengan dunia pendidikan modern dan mampu memunculkan ide-ide tentang pengembangan wacana masyarakat sipil pada sekitar tahun 1990-an (Suryani, 2015).

Pada tahun 1980-an serta 1990-an, NU menambahkan elemen baru kepada organisasi ini bernama LSM NU. Lembaga swadaya masyarakat NU telah dihadirkan untuk mendorong demokratisasi serta pluralisasi budaya politik NU melalui penyebaran ide-ide kritis kepada masyarakat yang lebih luas (Jufri, 2022). Dilihat dari perspektif para pemimpin NU seperti dinyatakan Abdurrahman Wahid dalam berbagai kesempatan sebagaimana di dalam catatan Bahtiar Effendy, perkembangan baru ini akan membebaskan NU dari sindrom status "monoritas politik". Hal itu juga memungkinkan NU dan anggota-anggotanya untuk memasuki arus utama proses-proses politik di Indonesia, yaitu politik kebangsaan, dan bukan politik partisan (Islam). Setelah secara resmi menjadi organisasi non-politik, namun tetap berperan sebagai salah satu organisasi pengembangan swadaya masyarakat Islam terbesar di Indonesia, maka sejak pertengahan 1980-an, NU mengalihkan fokus perhatiannya kepada program-program baru yang mengarah pada transformasi sosial-ekonomi dan politik (Effendy, 1998).

Pada Kongres Nasional NU ke-28 disahkan sebuah "master plan" yang lebih fokus untuk pembangunan komunitas pedesaan. Ini juga telah mengungkap determinasi dari PBNU yang baru terbentuk ke arah kebangkitan kembali organisasi NU kepada peranannya yang baru di masyarakat. Saat kongres, aktivis dan para pemimpin telah berdiskusi secara terbuka sebuah program aksi yang disiapkan untuk pengembangan komunitas pedesaan, Tampaknya, aplikasi dari konsep civil society untuk melahirkan masyarakat yang "hidup di kota, dalam kehidupan kota" mengalami penafsiran baru ketika pengembangannya dilakukan oleh NU. Dengan basis terbesar jamaah yang hidup di pedesaan NU lebih mengarahkan gerakan transformasi sosialnya bagi pencerahan masyarakat desa. Rancangan kerjanya sendiri telah menjadi teks yang telah disiapkan oleh lingkaran anggota NU yang aktif di LSM dan dipasang untuk diskusi selama tiga hari kongres. Teks menyediakan catatan ringkasan dari pembangunan yang tidak seimbang, perincian dari struktur-struktur tradisional, pertumbuhan populasi serta kehancuran lingkungan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Ada juga kritik secara terbuka terhadap pendekatan top-down atas pembangunan yang dianut oleh pemerintah dan tuduhan bahwa birokrasi lokal menarik dana dari koperasi-koperasi asli di pedesaan. Teks menyimpulkan sebuah proposal untuk melakukan pendekatan lebih bottom up untuk pembangunan pedesaan dengan keterlibatan koperasi-koperasi pedesaan di dalam proyek yang bertujuan untuk menghidupkan kembali industr-industri lokal dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam tulisan Bush, wacana masyarakat sipil yang berkembang di kalangan NU selama tahun 1990-an dihasilkan hampir secara eksklusif oleh organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan NU yang didirikan setelah keputusan Khittah '26. Meskipun banyak di antaranya didirikan dan terus dipimpin oleh tokoh-tokoh generasi ketiga, generasi baru aktivis dan intelektual masyarakat sipil yang muncul di bawah bimbingan mereka membawa wacana tersebut ke tingkat yang lebih dalam dengan menciptakan program-program berbasis masyarakat yang dirancang untuk membuat konsep-konsep abstrak seperti pluralisme, hak asasi manusia, dan partisipasi politik menjadi relevan bagi para petani, nelayan, dan buruh di desa-desa. Lihatlah lebih dekat beberapa di antaranya program-program berbasis

masyarakat dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang wacana dan praksis masyarakat sipil yang muncul di NU pada akhir tahun 1990-an (Bush, 2009).

Dalam pertemuan selama satu jam, antara sejumlah aktivis NU dari LAKPESDAM dan Presiden dari The Asia Foundation telah mendiskusikan gagasan tentang "pendekatan kultural untuk perubahan". Pada pertemuan tersebut, seorang tokoh serta aktivis NU, Abdullah Sarwani seperti ditulis Abdul Kadir, menjelaskan bahwa sebuah "pendekatan kultural untuk perubahan" merujuk pada reinterpretasi NU atas tradisi pesantren mereka yang ada untuk bertemu dengan problem sosial-ekonomi pada komunitas pedesaan. Dia menambahkan bahwa ini adalah tahap yang perlu baik bagi pemimpin NU maupun masyarakat, harus dididik serta disosialisasikan terkait pemahaman atas peran mereka di dalam kehidupan masyarakat modern. Demi sebuah agenda perubahan yang matang, banyak lembaga didirikan. LAKPESDAM yang didirikan tahun 1985, yang bertugas mengembangkan SDM NU melalui bidang penelitian berbarengan dengan pendirian LKK/NU (Lembaga Kemaslahtan dan Keluarga Nahdlatul Ulama) yang menangani kependudukan dan keluarga berencana, LP3NU (Lembaga Pengembangan dan Pembangunan Pertanian Nahdlatul Ulama) yang bergerak di bidang pertanian, Lajnah Ta'lif wan Nasyar untuk melaksanakan program NU di bidang penyiaran, melakukan pembenahan Lajnah Wafiqiyah untuk menangani harta-harta wakaf milik NU. Di bidang pendidikan, NU mendirikan Lembaga Ma'arif dan cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu belum terhitung keberadaan ribuan pesantren yang terikat dengan NU, dengan kontribusi pada aktivitas pendidikan dan sosial setelah diakui dan diterima secara luas (Kadir, 1999).

Sejumlah institusi NU, secara spesifik telah dihidupkan kembali dalam upaya untuk mendorong sebuah fokus terbesar pada target program transformasi sosial. Untuk contoh Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), telah diatur sinkronisasi dengan sistem pesantren NU pada tahun 1950-an. Bagaimanapun, lembaga menjadi berantakan pada tahun 1960-an serta melewati tahun 1970-an karena fokus NU pada aktivitas politiknya. Ini yang dihidupkan kembali pada kongres tahun 1984 dengan sebuah sasaran khusus pada modernisasi sistem pendidikan pesantren. Institusi telah memberikan kekuatan lebih serta tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pesantren NU, meliputi kemungkinan perombakan kurikulum, perbaikan standar ekonomi pesantren serta mengkoordinasikan sejumlah proyek dengan kementerian pemerintah. Sejumlah institusi baru NU juga menciptakan secara spesifik fokus pada misi baru organisasi untuk transformasi sosial-ekonomi. Mereka termasuk, untuk contoh, lembaga kesejahteraan sosial, Mabarrot yang telah didirikan sejak kongres 1984 dengan tujuan khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial pada masyarakat pedesaan (Kadir, 1999).

LAKPESDAM sendiri, dalam laporan terkait aktivitasnya kepada PBNU untuk periode Januari-September 1996, bagian dari misinya menjadi sebuah model civil society di Indonesia...harapannya bahwa kekuatan sosial ini akan membantu proses demokratisasi"). Program paling ambisius LAKPESDAM adalah Program Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK). Ini adalah sebuah program yang didesain secara khusus untuk mendidik serta mensosialisasikan kepada kelompok-kelompok ulama muda terkait konsep-konsep sosial kunci meliputi komunitas, pembangunan berpusat pada rakyat, civil society, dan demokrasi. Tujuan dari program ini adalah mendidik ulama-ulama muda terkait peranan pemimpin agama, dan masa depan mereka sendiri, di dalam masyarakat modern. LAKPESDAM secara struktural merupakan bagian dari NU, dan dengan demikian harus lebih mencerminkan kebijakan-kebijakan PBNU yang berlaku (Bush, 2009).

Di samping kampanye gigih para pemimpinnya, khususnya Abdurrahman Wahid, menyuarkan keharusan negara dan masyarakat untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, NU memberi perhatian kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan para anggotanya (Effendy, 1998). Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) dibuat serta secara eksplisit bertujuan untuk penyaluran kredit yang sangat dibutuhkan industri-industri pesantren skala kecil. Pada tahun 1990, NU juga memelopori pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menyediakan pinjaman bagi pengusaha kecil, bekerjasama dengan salah satu konglomerat China terkenal di negeri ini, Edward Suryadjaya, walaupun pemilik Bank Summa ini kemudian mengalami kebangkrutan (Effendy, 1998).

Gus Dur dan Pemberdayaan Civil Society

Setting situasi ketika KH. Abdurrahman Wahid mengokohkan eksistensi dirinya sebagai aktivis gerakan transformasi sosial, ketika di Indonesia sedang tumbuh kekuatan intelektual baru yang lebih berpikir inklusif serta integratif untuk mendialogkan wawasan keislaman dengan keindonesiaan. Seperti menurut Bahtiar

Effendy, di NU, Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Ketua Umum pada 1984 menggantikan posisi yang telah lama dijabat pemimpin politik Idham Chalid, tampil sebagai tokoh yang tak kenal lelah membawa organisasi ini sejalan dengan gagasan-gagasan pokok intelektualisme Islam baru. Berkaitan dengan itu, dengan dukungan para pemimpin NU yang terkenal seperti KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Ali Maksum dan KH. Achmad Siddiq, tujuan utama Wahid adalah mengembangkan gagasan tentang Islam Indonesia sebagai "Islam yang lebih menekankan pada integrasi nasional" (Effendy, 1998). Gus Dur berada di tengah-tengah pusaran sejumlah intelektual muslim baru seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Syafii Maarif, M. Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, Adi Sasono, juga M. Amin Rais—untuk menyebutkan sebagian dari mereka—dengan perjuangan Islam substantif, tidak secara legalistik serta formalistik.

Pada Mukhtar NU 1984 yang diselenggarakan di Pesantren Salafiyah Syafiiyah di Jawa Timur, dalam upaya memudahkan hubungan antara Islam dengan negara bersama KH. Achmad Siddiq, Abdurrahman Wahid meratakan jalan bagi deklarasi NU mengenai "finalitas" bentuk negara-bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar ideologinya. Dengan alasan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, mereka juga memelopori penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas organisasinya. Ditambah dengan upaya untuk melepaskan diri dari perangkap politik partisan, agenda kerja NU kemudian lebih diarahkan pada penguatan demokrasi, dialog simultan antara agama dengan politik kebangsaan, membangun konstruksi yang lebih egaliter antara negara dengan masyarakat sipil untuk kerangka kerja jangka panjang, serta berupaya tidak terjebak subyektivisme simbolis serta ideologis cita-cita negara Islam (Effendy, 1998).

Tampaknya, Gus Dur adalah seseorang yang bisa mengambil sisi positif dari semangat pencerahan (enlightenment) Barat sebagaimana ditulis A.S. Hikam bahwa pendekatan terbaik adalah melalui dialog intens dan kritis dengan modernitas untuk mencari titik-titik temu di mana kerjasama antara agama dan proyek pencerahan bisa dilakukan demi kemaslahatan manusia (Hikam, 2000). Dari titik ini kita bisa memahami posisi Gus Dur sebagai pejuang civil society yang tangguh ketika berhadapan dengan karakter rejim Orde Baru yang bersifat totalitarian. Memahami sepenuhnya realitas politik yang ada dalam rangka mengantisipasi perkembangan ke depan bangsa Indonesia, maka target utama Gus Dur adalah perubahan paradigma wacana dan kiprah politik Islam. Titik masuk strategis (strategis entry points) pun ditemukan: pengembangan wawasan kebangsaan, pembentukan civil society yang kuat, dan pemberdayaan masyarakat bawah. Dengan pendekatan sosial budaya, gerbong NU yang kendalinya dalam genggamannya Gus Dur, membuka segala kemungkinan bagi terbukanya ruang dialogis dengan berbagai elemen masyarakat sipil lain serta memantapkan langkah untuk memahami permasalahan mendasar yang di hadapi Bangsa Indonesia secara bersama-sama. Untuk kondisi "kekinian" serta "kedisninan" pada saat Gus Dur hidup, dan juga untuk jangkang lebih jauh bagi masa depan Indonesia (Hikam, 2000).

Semangat "Kembali ke Khittah 1926" pada Mukhtar 1984 telah menjadi paradigma dari gerakan NU untuk kembali pada peran asli sebagaimana awal kelahirannya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan serta keagamaan. Dalam konteks "pemberdayaan civil society" periode 1984-1997 adalah sketsa terbaik bagaimana kemudian peran vital NU sebagai penyeimbang kekuatan negara diperhitungkan oleh semua pihak. NU menjadi kekuatan progresif serta kritis, sembari pada saat bersamaan dibarengi dengan kemampuan untuk mendialogkan wawasan keislaman khas NU dengan kebangsaan secara inklusif, bahkan kosmopolitan. Dengan demikian, seperti menurut Ahmad Baso, sebutan NU pada "NU Kultural" tidak lagi menunjukkan sebuah komunitas yang dianggap tradisional. "NU Kultural" adalah sebuah civil society, masyarakat sipil. Bahkan, dengan mengutip Daniel Dhakidae yang menyebut NU era 1990-an sebagai "The last bastion of civil society" ("Benteng pertahanan terakhir masyarakat sipil"), Baso menulis NU yang bergerak sebagai oposisi saat itu (Baso, 2006).

Oposisi baik terhadap negara, maupun terhadap "primordialisme serta sektarianisme" berbasis agama yang terjadi saat itu. Dengan peran sebagai aktor sejarah sangat menentukan, pemberian label "NU Kultural" juga identik dengan sebutan "Abdurrahman Wahid Kultural" sebagai sebuah eksperimen kontemporer dalam gerakan kultural dan transformasi sosial di Indonesia. Abdurrahman Wahid Kultural ini diartikan secara ketat sebagai warisan-warisan pikiran Abdurrahman Wahid "pra-istana". Yakni sebuah khasanah pemikiran sebelum Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sebelum menjabat sebagai presiden keempat Republik Indonesia sejak 1999-2001 (Baso, 2006).

Pertanyaan kritisnya, lalu bagaimana gerakan "Abdurrahman Wahid Kultural" yang menempatkan civil society vis-à-vis state ini ketika Gus Dur sendiri menjadi presiden Indonesia keempat? Apakah NU tetap dapat memainkan diri pada garapan serius serta ambisius melalui kerja-kerja pemberdayaan masyarakat sipil

berbasis pedesaan? Atau akan mengulang lagi seperti seperti tahun 1952 serta terperangkap kembali pada logika kekuasaan secara praktis politis? Tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden, seperti ditulis Bahrul Ulum menempatkan NU pada posisi di persimpangan jalan sejarah, antara mendukung Abdurrahman Wahid sebagai presiden, dan memperkuat proyek civil society (masyarakat sipil). Untuk memperkuat masyarakat sipil disadari oleh NU menjadi ganjalan tersendiri ketika Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden. Berbeda dengan NU ketika masih berada di luar kekuasaan (state) pada masa rejim Soeharto, ketika orang-orang NU berikap kritis, seperti anak muda yang peduli nasib buruh, dan kalau negara tidak toleran, maka mereka dianggap sebagai bagian enemy dari negara (Ulum, 2002).

Terpilihnya Gus Dur jadi presiden adalah merupakan ujian atas komitmen kembali ke Khittah 1926 yang sangat mendasar karena magnet dari politik praktis sendiri yang memberikan gengsi serta hak-hak istimewa bagi para aktivis NU. Barangkali, dalam alam bawah sadar, kesempatan politik juga adalah momen sangat dinantikan. Hal ini terjadi karena menurut Ulum, hampir seluruh energi NU terkonsentrasi pada upaya "mempertahankan" Abdurrahman Wahid sebagai presiden, bukan berupaya bagaimana melaksanakan program-program strategis dan program dasar PBNU 1999-2004. Robin Bush telah mengkaji perubahan yang terjadi terkait dengan wacana masyarakat sipil NU dan gerakan Khittah '26 setelah Gus Dur terpilih jadi presiden. Dapat ditebak, tanggapan-tanggapan ini bervariasi dan kadang-kadang tidak konsisten satu sama lain. Namun demikian, dapat dilihat bahwa segera terjadi perubahan nyata dalam cara NU memposisikan dirinya dalam kaitannya dengan negara. Implikasi dari pengangkatan Wahid terhadap wacana Khittah '26 begitu radikal sehingga para pemimpin NU mengabaikannya begitu saja – yang paling menonjol adalah Mukhtar yang bertepatan Khittah NU sebagai tema resminya bahkan tidak membahas topik tersebut. Namun tampaknya, keberhasilan meraih kekuasaan formal dalam bentuk politik kenegaraan ada batasnya ketika Gus Dur "dilengserkan" sebagai presiden, dan perjuanganpun, seperti dalam tulisan Baso "beralih menjadi gerakan sosial dan kultural, ke level grass-roots (Baso, 2006).

Kini dua dasawarsa telah berlalu dari episode "Abdurrahman Wahid Kultural" serta "Abdurrahman Wahid Fase Istana". Mempertimbangkan agama sebagai kekuatan pembebasan dengan civil society sebagai instrumen utama gerakannya, sudah saatnya kita revitalisasi setelah diskursus serta praksisnya menepi dari pembicaraan para aktivis gerakan kultural NU. Menurut Moch. Muwaffiqillah, masa duapuluh tahun adalah masa interupsi yang panjang dengan tenggelamnya resonansi civil society dalam diskursivitas reformasi. Hefner dengan Civil Islamnya telah berhasil memotret teologi sosial dari Islam yang tercermin dalam pengembangan sivilitas yang berbasis pada keislaman. Demikian juga AS Hikam telah melakukan sintesis antara Islam demokrasi dengan civil society (Muwaffiqillah, 2022).

Esensi dari NU sebagai ormas keagamaan dengan semangat khittah 1926, ada pada ranah masyarakat sipil ini sebagaimana NU yang dipikirkan dalam ide serta praksis sosial KH. Hasyim Asy'ari. Namun NU Orde Reformasi tetap membawa spirit baru, terutama kemampuan menjaga jarak dengan PKB, partai yang dibidannya sendiri. Hal ini yang membedakannya dengan NU era 1952 yang wajahnya telah berubah secara radikal dari organisasi keagamaan menjadi organisasi politik. Meskipun pembentukan PKB dimotori oleh NU, namun wadah politik yang dibentuknya secara organisatoris terpisah dari PBNU. Fakta lain, NU juga tidak bisa menepis adanya pluralitas pilihan politik dari jamaahnya, baik pada partai-partai yang memiliki basis massa sejak masa Orde Baru seperti Golkar, PPP, dan PDI, maupun partai-partai yang lahir sejak masa reformasi seperti Partai Demokrat, HANURA, dan lain-lain. Dengan strategi yang tepat, menurut A.S. Hikam, maka pluralisme partai tersebut bisa menjadi lahan pendidikan politik yang baik bagi warga nahdliyin, yaitu mereka dapat belajar menentukan pilihan secara rasional dan bukan emosional serta memandang kegiatan politik bukan sebagai sesuatu yang sakral, melainkan dalam perspektif hak warga negara (Hikam, 2000).

Dengan paradigma Khittah 1926 yang berarti "garis pendirian, perjuangan, dan kepribadian NU, baik yang berhubungan dengan urusan keagamaan, maupun urusan kemasyarakatan, baik secara perseorangan maupun organisasi" NU harus membuat garis demarkasi yang jelas terkait posisinya sebagai organisasi yang bergerak di bidang agama, sosial, dakwah dan pendidikan. NU sudah semestinya menjaga netralitas dengan berbagai organ partai politik yang ada pada bulan-bulan menjelang Pemilu 2024, sembari pada saat bersamaan memperteguh keberadaan dirinya sebagai salah satu elemen civil society yang kuat di Indonesia. LAKPESDAM yang didirikan setelah semangat kembali ke Khittah 1926 digulirkan serta menjadi tumpuan pengembangan model civil society di Indonesia, menyangga beban sejarah berat untuk menjaga "keajegan" dari berjalannya paradigma tersebut. Tuhan yang harus ia jalani.

KESIMPULAN

Dari pemaparan tulisan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sepanjang sejarah sejak awal pendiriannya, NU memiliki akar komitmen kebangsaan sangat kuat. NU sebagai organisasi keagamaan ini, mengalami perubahan haluan gerakan sehingga sejak tahun 1952, lebih berorientasi politik praktis. NU adalah elemen kekuatan di luar negara serta berada di tengah-tengah masyarakat sipil, serta semangat "Kembali ke Khittah 1926" yang mengembalikan NU sebagai organisasi di bidang agama, sosial, dakwah, dan pendidikan serta menarik diri dari keterikatan langsung dengan politik praktis yang bergaung sejak tahun 1984, menemukan pijakan untuk menyemai gerakan civil society di Indonesia.

Pada kurun sejarah tertentu NU dalam kepemimpinan Abdurrahman Wahid mampu menunjukkan vitalitas serta energinya yang besar, menjadi kekuatan civil society di Indonesia serta menjadi "penyeimbang" dari kekuatan negara yang hegemonik. Namun, ketika jadi presiden, transformasi sosial yang diartikulasikan lewat pemberdayaan civil society berbasis masyarakat pedesaan ini mengalami kemandegan karena energi NU kembali tersedot pilihan politik praktis untuk mempertahankan Abdurrahman Wahid dari kekuasaan. Kini, setelah berlalunya dua dasawarsa reformasi, sudah tiba saatnya kita mempertimbangkan kembali agama sebagai kekuatan pembebasan dengan civil society sebagai instrumen utama gerakannya, dan LAKPESDAM PBNU yang sejak awal pendiriannya, didesain untuk mengembangkan model civil society di Indonesia, memegang amanah untuk mengawal kerja kultural NU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso, A. (2006). *NU studies: pergolakan pemikiran antara fundamentalisme Islam & fundamentalisme neo-liberal*. Erlangga.
- Bush, R. (2002). *Islam and civil society in Indonesia: The case of the Nahdlatul Ulama*. University of Washington.
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. LP3ES.
- Effendy, B. (1998). Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia. (No Title).
- Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Civil Society di Indonesia. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 13(2), 233–250.
- Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama'dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 1(1), 1–20.
- Fitriani, & Aisyah, S. (2019). Konsep Kafir dalam Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara. *Jurnal Studia Sosia Religia*, 2(2).
- Fuad, A. J. (2020). Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 153–168.
- Haidar, M. A., Ulama, N., & di Indonesia, I. (1998). Pendekatan Fikih dalam Politik. *Jakarta: Gramedia*, 34.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika.
- Hikam, M. A. S. (2000). *Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan civil society*. Erlangga.
- Jufri, A. (2022). Islam and Strengthening Civil Society (The Portrait of the Experiences of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah). *Jurnal Adabiyah*, 22(2), 252–272.
- Kadir, S. A. (1999). *Traditional Islamic society and the state in Indonesia: the Nahdlatul Ulama, political accommodation and the preservation of autonomy*. The University of Wisconsin-Madison.
- Madid, I. (2018). Dinamika Pemikiran Nahdlatul Ulama Dalam Merespons Kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2), 13–24. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2197>
- Muwaffiqillah, M. (2022). Revitalisasi Civil Society Melalui Teologi Sosial Pasca Dua Dasawarsa Reformasi. *ASKETIK: JURNAL AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL*, 6(2), 225–241.

- NU. (2015). 6 Anggaran Dasar NU No. I. *Utusan Nahdlatul Ulama*, 150.
- Rubaidi, A. (2008). *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama & masa depan moderatisme Islam di Indonesia*. Logung Pustaka.
- Suryani, S. (2015). Kontribusi NU sebagai Organisasi Civil Society dalam Demokratisasi. *Dialog*, 38(1), 51–64.
- Tobroni, I. S. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ulum, B. (2002). Bodohnya NU, Apa NU Dibodohi. *Jejak Langkah NU Era Reformasi: Mengikuti Khittah, Meneropong Paradigma Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Wahid, A. (1999). *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Pustaka Hidayah.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).